



## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan yang diterima :

#### **A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Penyelenggaraan organisasi BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pembantuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Jakarta, bentuk pemberian tugas yaitu menyelenggarakan program kegiatan nasional dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

#### **B. Program dan Kegiatan yang Diterima**

Adapun Program dan Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

##### **I. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal.**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Meningkatnya tingkat aspirasi (usulan kebijakan) dalam kerangka penyempurnaan kebijakan penanaman modal.
2. Meningkatnya penyebarluasan informasi terkini regulasi kebijakan di bidang penanaman modal kepada pemangku kepentingan.
3. Meningkatnya pemanfaatan informasi-informasi potensi penanaman modal daerah oleh pemangku kepentingan.
4. Meningkatnya fasilitasi kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal IV, dengan Sub Kegiatan : Pemantauan Realisasi Investasi di Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya.
2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan.
3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.



### C. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Diterima

I. Sebagaimana yang dimaksud poin (B) diatas, maka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diterima sebagai berikut :

#### Output :

Pemantauan terhadap data realisasi penanaman modal baik bagi kegiatan yang masih dalam kontruksi maupun yang telah berproduksi komersial.

#### Outcome :

- Difasilitasinya penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal secara berjenjang baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah;
- Dimanfaatkannya data realisasi penanaman modal bagi pengambilan kebijakan secara nasional;
- Dipatuhinya peraturan perundang-undangan bagi investor dalam melakukan kegiatan usahanya dan tidak penyalahgunaan fasilitas penanaman modal bagi para investor.

Sedangkan Kondisi penyerapan Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diterima sampai dengan Desember 2016, rencana anggaran Rp. 750.334.000,00 Realisasi anggaran terserap sebesar 100 % (Rp. 750.334.000,00).

### D. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Melaksanakan Tugas

Sumber anggaran dari APBN tahun anggaran 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.334.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Anggaran tersebut diperuntukan :

Belanja Pegawai	: Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	: Rp.	750.334.000,00
Jumlah APBN TA 2016	: Rp.	750.334.000,00

### E. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

SKPD yang melaksanakan tugas adalah BPMPT Provinsi Jawa Barat.

**F. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Perangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

Bidang Pengendalian sebagai pelaksana yang melaksanakan tugas pembantuan dari BKPM RI Jakarta, sumber anggaran dari APBN, dengan jumlah pegawai 13 orang.

Kekuatan SDM yang dimiliki mempunyai kualifikasi pendidikan S2 = 8 orang, S1 = 3 orang, SLTA = 4 orang, SLTP = 1 orang.

Masing-masing memiliki pangkat dan Golongan sebagai berikut :

Gol. IV/b = 1 orang, Gol. IV/a = 4 orang, Gol. III/d = 2 orang, Gol. III/c = 3 orang, Gol. III/a = 2 orang, II/c = 1 orang, II/b = 1 orang, II/a = 1 orang, I/c = 1 orang.

Jumlah pejabat struktural 3 orang terdiri dari pejabat eselon III = 1 orang dan pejabat eselon IV = 2 orang. Serta pejabat fungsional umum sebanyak 13 orang.

**G. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, seperti kendaraan roda empat yang disediakan oleh BKPM RI Jakarta, tidak sepenuhnya dipergunakan untuk operasional kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPM RI sebagai pemberi tugas pembantuan kepada BPMPT Provinsi Jawa Barat.

**H. Permasalahan dan Solusi**

Kurang berfungsinya penyediaan operasional kendaraan roda empat dan BKPM RI dalam melaksanakan tugas pembantuan penyelenggaraan kegiatan APBN. Sehingga dalam melaksanakan tugas pembantuan untuk operasional ke lapangan dalam rangka Pemantauan Realisasi Investasi di Daerah ke 26 Kab./Kota, 80% dengan menggunakan kendaraan pribadi dan atau rental.

**I. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan**

Tidak ada